



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 460/19.a/DINSOS/2020  
**Tanggal** : 02/01/2020

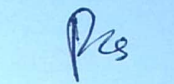
**No. Koreksi** : 30

**Instansi** : Dinas Sosial Kota Palu  
**Tentang** : Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Hamka**

**PENERIMA**

  
**Rahmawati**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAR 02/03/2015:05



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALI PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
TERPADU BERBASIS KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal pada program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat Kota Palu, perlu dibentuk tim pengendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGENDALI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

KEDUA : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data, bahan dan dokumen standar serta pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan prgoram;
- b. melakukan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. mengkoordinir pelaksanaan porgram;
- d. melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta menangani permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan program; dan
- e. berkoordinasi dengan seluruh tim yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama dengan program.

KETIGA : Tim Pengendali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

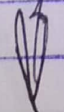
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,**

  
**P A S R I**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGENDALI PROGRAM  
BANTUAN SOSIAL TERPADU  
BERBASIS KELUARGA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Palu
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
2. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
3. Staf Dinas Sosial Kota Palu. 4 (empat) orang

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
RASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERKARSA	